

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1995  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH  
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**



**Proposal Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:  
RIYAN  
NPM : 1421020112**

**Program Studi : Siyasah Syar'iiyah (Hukum Tata Negara)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA  
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1995  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH  
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

**Proposal Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:  
**RIYAN**  
NPM : 1421020112

**Program Studi : Siyash Syar'iyyah (Hukum Tata Negara)**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Pembinaan narapidana narkoba di Lampung dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, kegiatan pembinaan yang dilakukan terbilang sudah cukup lama sebab operasionalisasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1985. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 34 tahun tersebut tentu sudah dapat menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung menjadi daerah yang dipilih karna jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotikanya tergolong lebih tinggi. Permasalahan yang diajukan adalah apakah metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan-peraturan pembinaan yang ada.

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung? Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung menurut UU Nomor 12 Tahun 1995? Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam membina narapidana penyalahgunaan narkoba di tinjau dari Fiqh Siyasah ?

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 dan Untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam membina narapidana penyalahgunaan narkoba di tinjau dari Fiqh Siyasah

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni pembinaan terhadap narapidana. Dimana penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan pola pembinaan yang dilakukan dari sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif dan reintegratif, peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkoba menurut UU Nomor 12 tahun 1995 yaitu Pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung lebih difokuskan pada pembinaan kemandirian karena pembinaan kemandirian yang diberikan telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 yaitu sistem pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan suda melaksanakan amanah yang sesuai hukum Islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pendidikan (pembinaan), bisa dikatakan telah sesuai dengan konsep Fiqh Siyasah.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya maka skripsi saudara :

Nama : RIYAN

NPM : 1421020112

Jurusan : Siyasa Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah dan hukum

Judul : **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1995 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG),**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197408162003122004**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah**

**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**  
**NIP. 195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung Telp: (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Simpesi dengan judul : **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1995  
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG)**, Disusun  
oleh : **Riyan, NPM: 1421020112, Jurusan: Siyasaah Syar'iiyyah.**  
Telah Disajikan Dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN  
Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Jum'at 10 Mei 2019.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**: Drs. Susiadi, M.Sos.I**

(.....)

**Sekretaris**

**: Arif Fikri, S.H.I M.Ag**

(.....)

**Penguji I**

**: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

(.....)

**Penguji II**

**: Dr. H. Khairuddin, M.H**

(.....)

**Dekan Fakultas Syar'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : 58)

Artinya; “Sesungguhnya Allah menyuruh *kamu* menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh *kamu*) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya *kamu* menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. AN NISA 58)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama, RI. Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: CV Putra Sejati Raya, 2003, h.413)

## PERSEMBAHAN

Dengan semangat, usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Joni dan Ibundaku tercinta Masna, atas ketulusannya dalam mendidik akhlak, membesarkan jiwa dan membimbing penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta keikhlasan dalam do'a sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung
2. Adik-adik tercinta. Yuyun Lestari, Meliyana, dan Iksan Nudin yang selalu memberikan semangat serta senyuman yang membuat penulis terus bersemangat.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga menjadi Perguruan Tinggi yang lebih baik kedepannya.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 01 juni 1995 di Desa Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, anak pertama dari empat saudara dari pasangan Bapak Joni dan Ibu Masna.

Pendidikan Dasar di SDN 01 Kangungan Dalam Kecamatan Tanjung raya, Mesuji. Diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMAN 1 Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Lulus pada tahun 2014.

Setelah menerima bukti kelulusan pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan dan sudah mendaftarkan diri di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas syar'iah, jurusan Siyasah.

Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, penulis juga telah mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPS) di Pengadilan Agama (PA) Kalianda Lampung Selatan.

Selama kuliah Penulis pernah aktif menjadi pengurus di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pencak Silat. Di dalam hidup ini penulis sangat percaya dengan kata-kata syair Arab yakni, kejarlah cintanya Allah SWT. Maka cintanya Allah akan mengejar cinta kita. Karena kita mencintai Allah SWT

Penulis

Riyan  
NPM. 1421020112



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan Ihsan serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga skripsi dengan judul “ Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung).” dapat diselesaikan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Alamsyah , S.Ag, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
2. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyyah UIN Raden Intan Lampung dan Frenki.M.Si. selaku sekretaris jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Drs. H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I dan Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Segenap dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan materi-materi selama ini, guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan dan karyawan baik perpustakaan Fakultas Syari’ah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, referensi dan lain-lain.
6. Terimakasih kepada Aprina orang yang sangat kusayangi telah memberikan semangat dan membantu selama proses penyusunan skripsi.

7. Kuucapkan juga terimakasih kepada guru-guru ku dari SD, MTS, sampai SMA yang tidak bisa kusebutkan satu persatu namanya, berkat kesabaran merekalah yang telah ikhlas mendidikku, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dari saya yang tidak tau apa-apa menjadi tau dan paham pentingnya pendidikan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini jasa mu akan kukenang sampai akhir masa.
8. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yaitu Andika Wandayanti, Andriyansyah, Bagus Prido Zaini, Desya Fitri, Hipzoni, Kurnia Sulistya Zahra, Hani Mulya Putri, Marsili Yansyah, M. Husaini, Peni Fitriyanti, Farizon, Syaifudin, Selfi Merliani, Wahyu Samanhudi, Windu Fitria, yang telah memberikan semangat, menemani serta membantu selama proses belajar di bangku perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.
9. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batuliman Indah kecamatan Candi Puro Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan semangat dan membantu selama proses penyusunan skripsi.
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Mei 2019

**Riyan**

**NPM. 1421020112**

## DAFTAR ISI

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>      | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>      | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>         | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>      | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>      | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>         | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>        | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>    | <b>xiv</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Penegasan Judul.....                | 1  |
| B. Alasan Memilih Judul.....           | 4  |
| C. Latar Belakang Masalah .....        | 5  |
| D. Rumusan Masalah.....                | 13 |
| E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... | 14 |
| F. Metode Penelitian .....             | 15 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|  |    |
|--|----|
| A. Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqh Siyasah .....                     | 22 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah.....                                      | 22 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....                                  | 26 |
| 3. Siyasah Qadla iyyah Syar'iyah .....                               | 31 |
| 4. Narkoba dan Sanksinya Dalam Hukum Islam .....                     | 31 |
| B. Lembaga Pemasyarakatan.....                                       | 33 |
| 1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....        | 33 |
| 2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana             | 38 |
| 3. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan<br>Narkotika..... | 40 |



### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung .....                                      | 44 |
| 1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung .....                                 | 44 |
| 2. Tujuan, Visi dan Misi.....   | 46 |
| 3. Srtruktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung .....                               | 47 |
| B. Program Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung .....                                 | 55 |
| C. Peran Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung dalam membina narapida penyalahgunaan narkoba..... | 58 |
| 1. Progran Terapi Untuk Ketergantungan Napza.....   | 58 |
| 2. Tahapan Rehabilitas After Care (Pendidikan) .....  | 63 |

### **BAB IV PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1995 DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG)**

|  |    |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.....                           | 65 |
| B. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Dalam Membina Narapidana Penyalagunaan Narkotika Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 ..... | 67 |
| C. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Siyasah .....    | 73 |

## **BAB V    PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 78 |
| B. Saran .....      | 79 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apa lagi dalam suatu penelitian ilmiah hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan peneliti lakukan ini adalah berjudul: “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)” adapun beberapa istilah yang penulis anggap perlu untuk di uraikan yaitu :

#### **1. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>2</sup> Adapun Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sebagai suatu institusi negara yang menampung dan membina narapidana yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berlokasi di Jln Pramuka Nomor 12, Langkapura, kota Bandar Lampung yang merupakan tempat penulis mengadakan penelitian.

---

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.



## 2. Pembinaan Narapidana

Pembinaan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan: “proses, pembuatan, cara membina, usaha, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.<sup>3</sup> Sedangkan narapidana adalah “orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>4</sup> Menurut Dirjosworo, narapidana adalah “manusia biasa seperti manusia lainnya karna hanya melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Narapidana juga dapat diartikan seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum”.<sup>5</sup>

Adapun pembinaan narapidana yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu proses dan upaya perbaikan manusia yang telah melanggar hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian pada orang lain dan kemudian menerima sanksi dari hakim dengan pengambilan kemerdekaan sementara melalui kurungan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki mental sepiritual narapidana.

## 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat

---

<sup>3</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia. Edisi kedua cet. Ke-IX*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 134

<sup>4</sup> Jur Andi Hamzah, *Termonologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 107

<sup>5</sup> Soedjo Nomor Dirjosworo, *Sejarah dan Azas Teknologi (Permasyarakatan)*, Amico, Bandung, 1992, h. 192

dimasuki oleh narkoba dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat.<sup>6</sup>

#### **4. Undang-Undang No 12 Tahun 1995**

Prinsip dari negara hukum Indonesia yang menjelaskan bahwa aturan/hukum merupakan tolak ukur dari implementasi undang-undang itu sendiri. Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan pemasyarakatan merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab<sup>7</sup>

#### **5. Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

---

<sup>6</sup> Siswantoro Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 142

<sup>7</sup> Widodo, sistem pidana dalam cyber crime, (yogyakarta: laksbang mediatama, 2009), h. 78

Dasar yang paling utama bagi negara menurut fiqh siyasah adalah bahwa alhakimayah kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada ditangan Allah SWT sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah khalifah atau perwakilan dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala yang diperbuat, tetapi harus bertindak dibawah undang-undang ilahi yang bersumber dan diambil dari kitab Allah dan sunah rasulnya.<sup>8</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini, adalah:

1. Penjatuhan pidana bukan sebagai tindakan balasan dari negara tetapi sebagai bentuk penegakan keadilan terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum sehingga jera dan tidak mengulangnya. Oleh sebab itu negara berkewajiban membina narapidana agar menjadi lebih baik dan memiliki sikap tunduk, taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Untuk itu peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.
2. Melalui pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, narapidana dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya baik mental maupun spiritual selama dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup secara normal seperti sebelumnya.

---

<sup>8</sup> Totok Jumanoro Dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: amzah 2009), h. 63



### C. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi dunia memberikan dampak perubahan yang luas terhadap kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan yang begitu pesat tentunya membawa dampak pada perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan ada juga yang tidak sesuai dengan norma hukum. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, tentunya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai hukum dapat disebut sebagai penyelewengan yang menyebabkan terganggunya ketertipan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Penyelewengan yang demikian, biasanya dicap masyarakat sebagai suatu kejahatan.

Secara yuridis, kejahatan sebagai perbuatan yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.<sup>9</sup> Sedangkan Bonger menyatakan bahwa: “kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan”.<sup>10</sup>

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1995, maka kualitas sumberdaya manusia Indonesia

---

<sup>9</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, h. 14

<sup>10</sup> *Ibid*

sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan sisi lain melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Indonesia cukup rawan terhadap ancaman bahaya peredaran narkoba (Narkoba, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) dan penyalahgunaanya. Indonesia merupakan sasaran berbagai kegiatan subversi tetapi hukum sebagai perangkat ketentuan, maupun alat ataupun pelaksanaan pencegahan masih banyak kekurangan. Sanksi hukum positif (UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997) dirasakan tidak setimpal, sehingga tidak menjerakan pelaku tindak pidana narkoba. Diperlukan adanya alternatif hukum (hukum Islam) mengingat hukum islam juga merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia yang dapat memberikan solusi yang responsif dan antisipatif terhadap permasalahan narkotika di Indonesia.<sup>11</sup>

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika di sertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai

---

<sup>11</sup> AL, ADALAH VOL 11, No 1, 2013, Acep Syaifullah: Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, diakses dari <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i1.281> tanggal 14 Mei 2019

budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>12</sup>

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan atau diperkenalkan oleh Dr. Saharjo dalam pidato penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia di istana negara Jakarta pada tanggal 5 juli 1963 dengan judul *“Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pantjasila-Manipol/Usdek”* pada tanggal 5 juli 1963, menurutnya penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, karena itu negara tidak berhak membuat orang menjadi lebih buruk/jahat dari pada sebelum masuk lapas. Dikatakan juga pembinaan dan bimbingan harus dilakukan sebagaimana perilaku terhadap sesama manusia meskipun ia telah tersesat.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa perubahan sistem kepenjaraan yang pada awalnya menjadi tempat sebagai balas dendam menjadi sistem pemasyarakatan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, demikian halnya dengan institusi yang semula rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan sistem Lembaga Pemasyarakatan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

---

<sup>12</sup> Syamsul Hidayat, *Pidana Mati Di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Press, 2010), h 1

<sup>13</sup> Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Lembaga Permasayarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011 h. 5 Lihat Juga R. Achmad S. Soemandi Praja dan Romli Atmasasmita, *System Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1992, h. 13



“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>14</sup>

Hukum positif maupun hukum Islam memandang bahwa narkoba dilarang keberadaannya apabila disalahgunakan bukan untuk kemaslahatan bahkan dilihat dari sisi kemaslahatannya pun sebenarnya juga sangat kecil, karena dampak negatifnya sangatlah besar mengancam jiwa, akal, agama, harta manusia dan sulit sekali bahkan hampir tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat dan kemungkinan besar sampai merenggut nyawa manusia yang sangat banyak sekali dalam sewaktu-waktu.

Hukum selaku alat yang mengatur pertahanan dan keamanan negara untuk mengastasi bahaya yang mengancam negara pada tindak penyalahgunaan narkoba harus bergerak lebih cepat mengingat tingkat kejahatan narkoba yang begitu kejam. Hukum merupakan alat utama masyarakat dalam rangka memperoleh perlindungan dan keadilan serta memberikan pemahaman yang kongkrit terhadap perkembangan tindak kejahatan yang dapat merusak jiwa manusia dan negara yaitu narkoba.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) Takut berbuat dosa; (2) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative; (3) Takut karena malu berbuat jahat, penegakan hukum dengan sarana bebas hukuman mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>15</sup>

Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Maa'idah ayat 90-91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة : 90-91)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantaramu larangan minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”. (Al-Maa'idah: 90-91)<sup>16</sup>

Jika dilihat kenyataan yang terjadi disekitar kita akan tampak bahwa pemakaian narkoba (narkotika, obat-obatan terlarang, dan alkohol) ini melahirkan tindak kriminal atau perbuatan jahat seperti, mencopet, mencuri,

<sup>15</sup> Siswantoro Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 142.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Surabaya: CV Jaya Sakti, 1997), h .445.

merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinahan, pemerkosaan, serta pelecehan seksual lainnya. Tidak sedikit yang diakibatkan pemakaian benda tersebut.

Dapat diketahui bahwa hukuman bagi pecandu narkoba adalah jilid atau dera yakni dipukul dengan cambuk pada anggota badannya. Pada zaman Rasulullah sendiri diungkapkan bahwa jumlah pukulan sebanyak 40 kali, keadaan ini berlaku hingga zaman Khalifah Abu Bakar RA akan tetapi pada zaman Khalifah Umar RA jumlah pukulan itu bertambah sebanyak 80 kali, ini dilatar belakangi banyaknya pecandu Khamr pada waktu itu. Bahkan para ulama memberikan dukungan penerapan sebanyak yang dilakukan Umar RA tersebut seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki.<sup>17</sup>

Lahirnya sistem pemasyarakatan membawa bangsa Indonesia memasuki era baru dalam pembinaan narapidana. Tujuan dari pembinaan narapidana adalah supaya setelah kembali kemasyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan. Dan dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum.

Merujuk konteks di atas, maka pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana dengan tujuan memperbaiki sikap dan perilaku serta mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu, dalam pembinaan narapidana harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan pembinaan yang telah ditetapkan berhasil secara optimal.

---

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), h,71.

Berkenaan dengan pembinaan narapidana, pembinaan narapidana dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* merupakan pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan prilaku, kesehatan jasmani-rohani. Dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian jenis pembinaan *ekstramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa pembinaan narapidana dapat dilakukan secara *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. Keduanya mengandung unsur binaan *intramural treatment* (di dalam lapas) lebih menonjol dibandingkan dengan pembinaan *ekstramural treatment* (di luar lapas), seharusnya keduanya berjalan seimbang, sehingga apa yang dicita-citakan oleh sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara maksimal.

Pembinaan akan berlangsung dengan baik apabila didukung fasilitas pembinaan dan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan, selain kemauan dan keseriusan narapidana dalam

---

<sup>18</sup> Josias Simon R Dan Thomas Sunaryo , *Op. Cit.*, h. 13.



pembinaan. Terkait dengan fasilitas, banyak Lembaga Pemasyarakatan yang telah memiliki fasilitas pembinaan yang relatif baik, namun fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sumber dayanya belum mendukung, baik petugas maupun narapidananya.

Hukum Islam sebagai aturan hukum yang lengkap selalu mengedepankan kemaslahatan untuk manusia, karna itu hukuman dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki diri dan menjaga ketentraman masyarakat umum. Sehingga hukuman dalam Islam memiliki fungsi sebagai pencegah, yakni menahan pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya dan bertaubat. Di samping itu, Islam selalu melakukan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama serta menjauhkan diri dari tindak jarimah. Hukum dalam hukum Islam juga berfungsi sebagai pendidikan bagi pelaku jarimah. Pendidikan disini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan didikan bagi pelaku jarimah untuk tidak melakukan perbuatan jarimah kembali setelah kembali kedalam masyarakat.

Jika melihat tujuan hukum dalam Islam sebagai mana tergambar di atas, maka tujuan hukuman tersebut selaras dengan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menganut bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahanya dan tidak lagi melakukan tindakan pidana yang sama serta kembali menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun, apakah pada kenyataannya sistem pemasyarakatan (sebagai lembaga pembinaan narapidana) yang selama ini

telah ditetapkan, apakah sudah terealisasi apa belum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, karena pembinaan narapidana harus didukung dengan sumber daya yang ada, baik petugas yang memumpuni dan kesadaran narapidana untuk dibina serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana telah sesuai dengan konsep hukum Islam.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik terhadap masalah-masalah diatas, dan penulis akan mencoba meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan mengangkat judul penelitian: “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung).”

#### **D. Rumusan Masalah**

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah di atas, dan agar tidak terjadi penyimpangan, penulis akan tekankan bahwa pokok bahasan yang akan menjadi titik fokus kajian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung?
2. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung menurut UU Nomor 12 Tahun 1995?

3. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika di tinjau dari Fiqh Siyasah ?

## **E. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung menurut UU Nomor 12 Tahun 1995.
- c. Untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika di tinjau dari Fiqh Siyasah.

### **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, dapat memperkaya khasana pemikiran keIslaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat kesarjanaan hukum (SH) di Fakultas syar'iah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi hukum positif maupun para hukum Islam di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kaca kehidupan yang sebenarnya.<sup>19</sup> Di mana penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni pembinaan terhadap narapidana.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah “suatu metode dalam peneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan apa adanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. *Data Primer*

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 32.

<sup>20</sup> Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kulintatif Bidang Filsafat*, Paradigm, Yogyakarta, 2005, h. 58.



digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.<sup>21</sup>

Adapun data primer yang diperoleh secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

b. *Data Sekunder*

Data skunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>22</sup> Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka.

4. Populasi Dan Sampel

a. *Populasi*

Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yang berjumlah 130 orang, sedangkan jumlah narapidana penyalahgunaan narkoba berjumlah 64 orang.

b. *Sampel*

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel, alasannya penulis menggunakan sampel tersebut adalah karena heterogen, untuk lebih jelasnya non

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Renika Cipta, Jakarta, 1998 h. 114.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, rineka cipta. Jakarta, 1999, h. 104.

random sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling yaitu memilih sekelompok subjek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang di ketahui sebelumnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, sehingga populasi yang di jadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari petugas dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 5 orang, sedangkan narapidana penyalahgunaan narkoba berjumlah 2 orang yang akan di jadikan sampel dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data yang berasal dari sumbernya penulis menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan (*field research*). Metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>25</sup> Dalam penelitian perpustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mempelajari sebagai bahan bacaan atau literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, baik berupa Al-Qur'an, Al-Hadits, buku-buku karangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Kemudian untuk metode pengumpulan dan pengambilan data dari lapangan, penulis mempergunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

##### a. Metode Interview

Menurut Mardalis bahwa interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 128.

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Op Cit.*

lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>26</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>27</sup>

Peneliti akan melakukan interview dengan 5 pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan 2 narapidana guna memperoleh informasi dan data-data yang ada disana.

Jenis interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan kepada interviewer.<sup>28</sup> Metode interview ini penulis gunakan sebagai metode utama, untuk mencari data-data yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

#### b. Metode observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki atau diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Mardalis, *Op Cit.* h. 64.

<sup>27</sup> Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosda Karya, Bandung. 2001, h. 135.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Andioffset, Yogyakarta, 2004, h. 192.

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, h. 54.

Menurut jenisnya, ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: observasi partisipan dan observasi non partisipan, observasi sistematis dan observasi non sistematis, dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen”.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan. Penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang di observasi dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan yang objektif. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah akan dapat lebih mengingat lebih banyak fenomena yang perlu dicatat atas kondisi yang ada pada tempat penelitian. Yang diamati disini adalah Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana Kelas I Bandar Lampung. Seperti mengamati dan mencatat aktifitas petugas dalam melakukan pembinaan narapidana.

#### c. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode Dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langgar”.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Koentjaraningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.<sup>32</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, h. 70.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 23.

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1993, h 46.



mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumen dan ada hubungannya dengan penelitian. Adapun data yang diambil melalui metode ini adalah data-data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang berupa sejarah berdirinya, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan data tertulis lainnya.

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisa data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif. Yaitu “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.<sup>33</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa dalam analisa kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang telah di kumpulkan (observasi, interview, dokumentasi) kemudian di proses melalui tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data yang berupa kalimat-kalimat yang tidak diukur dengan menggunakan angka-angka ataupun jumlah. Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara

---

<sup>33</sup> Lexi J. Meleong, *Op. Cit.*, h. 29.

<sup>34</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Ui-Press, Jakarta, 1992, h. 15.

menguraikan dengan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif.

Metode berfikir deduktif yaitu metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>35</sup> Metode ini digunakan dalam mengupulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkoba menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang ditinjau dalam hukum Islam dan selanjutnya di analisa dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.

---

<sup>35</sup>Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 29.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *Fiqh Siyasah* merupakan *Tarqib Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siayasah*. Secara etimologis, *Fiqh* merupakan bentuk *mashdar* (gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>36</sup>

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut AL-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana di anut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu

---

<sup>36</sup>Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (mesir:mathba'ah Dar al-Ta'lif,1993, h. 10

manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah adalah sebagai berikut: (Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya).<sup>37</sup>

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai berikut: “siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah “ mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”.<sup>38</sup>

Setelah di uraikan definisi fiqh dan siyasah, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya di kemukakan definisi fiqh siyasah. Penting dicatat, dikalangan teoritis politik Islam, ilmu fiqh siyasah itu sering juga disinonimkan dengan ilmu siyasah syar’iyyah. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, fiqh siyasah adalah ilmu tata

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 14

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 18



negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>39</sup>

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyasi* maka *fiqh siyasah* yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>40</sup>
- b. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islâmiyyah bi Al-Kuwait adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>41</sup>
- c. Imam Ibn 'Abidin adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal

---

<sup>39</sup> Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab Jilid 6 (bierut : Dar al-Shadir, 1986), h. 108

<sup>40</sup> Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), vol. 2, h. 178.

<sup>41</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.

dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>42</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *Fiqh Siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu:

- a. Pihak yang mengatur
- b. Pihak yang diatur

Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>43</sup>

Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum. Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian

---

<sup>42</sup>Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1987), vol. 3, h.147.

<sup>43</sup>Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Rineka Cipta: 2003, h. 28

untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*. Dengan demikian, rambu-rambu *fiqh siyasah* adalah:

- a. Dalil-dalil *kulli*, baik yang tertuang di dalam Al-qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW
- b. *Maqashid al-syari'ah*
- c. kaidah usul *fiqh* serta cabang-cabangnya

Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyasah wadl'iyyah* itu bukanlah *fiqh siyasah*, hanya saja selagi *siyasah wadl'iyyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.<sup>44</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.<sup>45</sup>

Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al-S ulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*

---

<sup>44</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), h. 6

<sup>45</sup> 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13

<sup>46</sup>Zakaria Mahyudin Bin Syarif, *Tahzib al-Asma Wa Lughat, Jus III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t), h.23

- c. *Siyasah Qadla'iyyah*
- d. *Siyasah Harbiyyah*
- e. *Siyasah 'Idariyyah*

*Dusturiyah* berasal dari bahasa persia yang berarti *dusturia*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (kovensi) maupun yang tidak tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa siyasah *dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan soal tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, maqashid al-shari'ah, dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni disebut dengan fiqh.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *Fiqh Dusturiyah*, merupakan nama salah satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalam *Dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, *dusturiyan* dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.



Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. *Siyasah Qadla'iyyah*
- b. *Siyasah dariyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

Sementara Abd Al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:<sup>48</sup>

- a. *Siyasah Qadla'iyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:<sup>49</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h.28

<sup>48</sup> Abi Abbas Ahmad Bin Yahya al-Wansyarizi, *Mi'yar al-Mu'rab Wal Jami' al-Mu'rab*, Juz I, (Maghribiyah: Darul Qarib Islami, 1401 H), H. 57

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 23

- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah* (politik peperangan).

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iiyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), vol. 1, h. dan 19 san, seperti karangan Al-Mawardi (364-450 H/975-1058) dengan 33

### 3. Siyasah Qadla iyyah syar'iyah

Adalah politik yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan dalam sebuah peradilan Islam.

### 4. Narkoba dan sanksinya dalam hukum islam

#### a. Narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stopor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>51</sup>

#### b. Sanksi Secara Umum

Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda. Sistem pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika menggunakan double track system yaitu menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.

#### c. Sanksi Narkoba Menurut Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jika dilihat menurut hukum pidana islam. Ada yang berpendapat sanksi adalah *had*, dan adapula yang berpendapat sanksi adalah takzir. Berikut ini penjelasannya<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Sudarsono SH, Msi, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 131

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishinh House, 1996), h. 65

1) Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba berikan sanksi *had*, karena narkoba dianalogikan dengan *khamr*. Yaitu hukum darah sesuai berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pelanggar. Terhadap pelaku pidana mengkonsumsi minuman memabukan atau obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran, menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut syafi'i hukumannya hanya 40 kali<sup>53</sup>

2) Wahbah Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zir karen:

- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
- b) Narkoba lebih berbahaya dari khamr; dan
- c) Narkoba tidak diminum, seperti khamr.

Menurut pendapat penulis, bawasanya narkoba berstatus haram karena zatnya yang dapat memabukan dan dapat *diciyaskan* keharamannya dengan khamr. Lalu, dalam hukum penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana islam adalah lebih mengara kepada penjatuhan sanksi takzir, karena selain yang dijabarkan oleh Wahbah Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari bahwa narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW dan tidak secara gamblang dijabarkan dalam Al-Qura'an dn Sunnah.

---

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 101

#### d. Penjara Dalam Islam

Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari *Ta'zir*. *Taz'ir* adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh khalifah. Syaikh Abdurrahman Al-Maliki dalam buku sistem sanksi dalam Islam menjelaskan bahwa pemenjaraan memiliki arti mencegah atau menghalangi seseorang untuk mengatur diri sendiri.<sup>54</sup>

### B. Lembaga Pemasyarakatan Dalam UU No 12 Tahun 1995

#### 1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> khalifah. Syaikh Abdurrahman Al-Maliki, sistem sanksi dalam Islam, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 75

<sup>55</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 60



Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun dasar hukum tentang narkoba antara lain

- a. UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba
- b. UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
- c. UU No. 7 Tahun tentang pengesahan konvensi PBB tentang peredarab gelap narkoba dan psikotropika 1988
- d. UU No. 8 Tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971

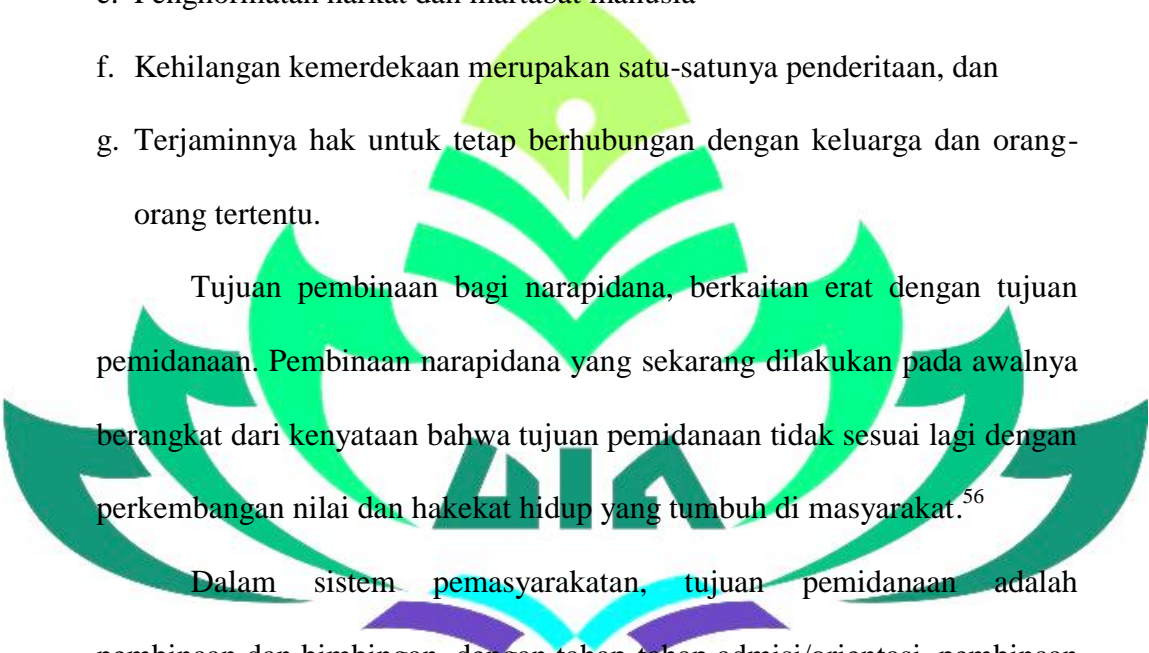
Sedangkan landasan hukum narkoba yaitu:

- a. UN Convention Againsts The Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psycotropics Substances 1988.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikottropika

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang pengesahan konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika 1988.
- e. Undang-Undang no. 8 tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971.
- f. Keputusan presiden RI No. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasioal.
- g. Inpres RI No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif lainnya.

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- 
- a. Pengayoman
  - b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
  - c. Pendidikan
  - d. Pembimbingan
  - e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
  - f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
  - g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ketengah-tengah masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>56</sup>C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta, h.43

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>57</sup>

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti pribadi warga negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 10

## 2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan terdapat narapidana yaitu orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>58</sup>

pembinaan narapidana dibedakan menjadi tahap pembinaan tahap awal, dan pembinaan tahap lanjutan. Pembinaan tahap awal meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa, dan pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemandirian meliputi pembinaan kemandirian yang terdiri dari program pendidikan keterampilan, keterampilan untuk mendukung usaha industri, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, keterampilan untuk mendukung usaha pertanian. Pembinaan lanjutan meliputi cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, asimilasi dan remisi.

Pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana yaitu dalam pembinaan awal maka narapidana akan memperoleh pembinaan melalui kegiatan penyuluhan tentang arti penting hukum, kegiatan pramuka, program pendidikan melalui program paket A, paket B, dan paket C, pendidikan keterampilan yang meliputi keahlian las, pengecatan mobil, berbagai kerajinan tangan, pengolahan rotan, dan keahlian mengolah kayu.

---

<sup>58</sup>Petrus & Irwan Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 78



Pelaksanaan program pembinaan lanjutan yaitu dengan diberikannya hak kepada narapidana untuk memperoleh cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, asimilasi dengan persyaratan yang telah ditentukan.<sup>59</sup>

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana meliputi faktor yang mendukung program pembinaan yaitu adanya kemauan individu narapidana untuk mengikuti program pembinaan, adanya kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain, adanya dukungan dari pihak keluarga, petugas pemasyarakatan dan penasehat hukum. Faktor penghambat dalam membina narapidana adalah antusias warga binaan yang masih rendah untuk mengikuti program pembinaan, over capacity atau terlalu penuhnya warga binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan pembinaan kurang intensif.

Upaya mengatasi hambatan dalam program pembinaan adalah memberi motivasi terhadap narapidana untuk lebih antusias dalam menjalani program pembinaan, memberikan tindak lanjut terhadap pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kepada mantan narapidana agar tidak mengulangi tindak kejahatan. Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan harus melaksanakan pembinaan secara baik dan intensif sejak narapidana masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, serta pihak Lembaga Pemasyarakatan harus

---

<sup>59</sup>Ibid, h. 81

berusaha menggali bakat yang dimiliki oleh narapidana, sehingga dengan demikian narapidana dapat menentukan pembinaan yang akan dijalani sesuai keterampilan yang dimiliki, selain itu juga pihak Lembaga Pemasyarakatan harus mengasah berbagai keterampilan lain yang harus dikuasai oleh narapidana.

### 3. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka kalau membahas mengenai hukum tidak terlepas membicarakan tentang kehidupan manusia. Hukum itu pada hakikatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan yang dapat membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan.<sup>60</sup>

Hukum adalah kekuasaan-kekuasaan yang mengusahakan ketertiban, sekalipun hukum itu kekuasaan, mempunyai hak untuk memaksa dan berlaku sebagai sanksi, namun hendaknya di hindarkan, jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada penguasa yang menyalah gunakan hukum, maka muncullah istilah “*Rule of law*”. *Rule of law* berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau yang berkuasa. Demikian ini berarti supremasi hukum. Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, sehingga tidak boleh diartikan bahwa manusia pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. Didalam kitab-kitab

---

<sup>60</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia*, (Yogyakarta, Mandar Maju, 1999), h. 20

klasik kareangan para nazhab syafi'i menyangkut dengan minum khamar termasuk kedalam hudud dan bukan kedalam takzir. Hudud dalam segi kata adalah jamak (plural) dari kata had yang berarti batasan pemisah antara dua hal sehingga salah satu tidak termasuk kedalam hal lainnya. Maka lain dari had adalah larangan, pencegahan, serta batas akhir dari suatu yang dituju. Ali bin Abi Thalib menyarankan agar peminum khamar di cambuk sebanyak 80 kali cambuk dikarenakan setiap peminum khamar akan mabuk, jika mabuk dia mengigau, apabila mengigau ia memfitnah, sedangkan hukum membuat fitnah (qadz) adalah 80 kali cambuk. Saran tersebut akhirnya dapat persetujuan dari para sahabat yang lain;. Jadi sumber larangan minum-minuman keras berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, hukumnya berdasarkan hadis dan jumlah cambukan sebanyak 80 kali berdasarkan kepada ijma' sahabat.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka segala produk atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada hukum. Dalam kaitannya dengan peranan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan pembinaan bagi narapidana narkoba sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Landasan hukum yang dipakai adalah: <sup>61</sup>

- a. Pancasila sila ke lima (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)
- b. UUD 1945 (Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar)
- c. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- d. KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

---

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h. 45

- e. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- f. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan perkembangan warga binaan Pemasyarakatan
- g. PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang syarat dan tata kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
- h. Per. Men Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI<sup>62</sup>

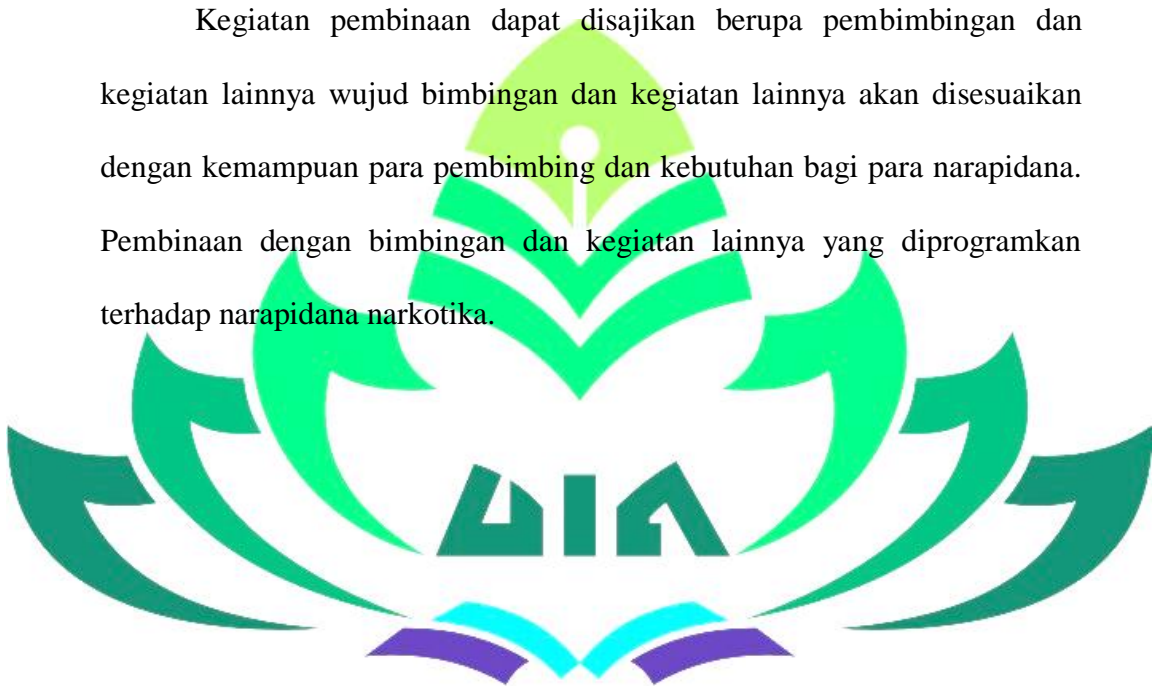
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan tonggak sejarah baru bagi pemasyarakatan. Dengan Undang-Undang ini maka diakhiri segala atribut hukum kolonial yang mengatur mengenai kepenjaraan yang dalam kenyataan telah lama ditinggal dan diganti dengan sistem pemasyarakatan. Untuk itu selanjutnya berbagi konsepsi dan sistem pemasyarakatan yang selama 30 tahun lebih dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat “*ad-hoc*” dengan undang-undang ini diberi landasan hukum yang kuat baik ditinjau dari segi formal maupun material penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berguna bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat konsepsi sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

- a. Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kesenjaraan.
- b. Petugas Pemasyarakatan sebagai Aparat Penegak Hukum.
- c. Petugas Pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional.
- d. Pengaturan secara tegas mengenai hal-hal warga binaan pemasyarakatan.

Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana narkoba.





### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung**

###### **1. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.**

Pembangunan infrastruktur dinamis Kotamadya Bandar Lampung dengan ciri khusus pertanian dan industri dapat memicu pendapatan perkapita masyarakat Kotamadya Bandar Lampung. Kemajuan pembangunan dapat menimbulkan dampak ikatan atau efek samping yang menunjukkan adanya tendensi kriminologen-kriminologen baru akibat pergeseran nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga Kotamadya Lampung membutuhkan instansi untuk menampung para pelanggar hukum. Untuk menjawab kebutuhan tersebut telah dibangun gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung pada tahun 1985.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Pramuka Nomor 12 Rajabasa Bandar Lampung. Mulai beroperasi sejak tanggal 25 Oktober 1985. Pada awal operasional, mempergunakan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Karang. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 2003 nomenklatur tersebut diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Lapas ini menempati lahan seluas 97.432 M2 dengan perincian luas areal untuk bangunan Lapas adalah 48.050 M2 dan luas areal untuk perumahan dinas area pertanian seluas

49.382 M2. Kapasitas hunian Lapas adalah diperuntukkan bagi 620 orang, dan pada saat sekarang isi hunian adalah sebanyak 1158 orang<sup>63</sup>.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang termasuk dalam kantor wilayah kemterian kehakiman dan hak asisi manusia provinsi Lampung, Lembaga Pemasyarkatan Kelas 1 Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menampung, merawat serta membina narapidana. Lembaga Pemasyarakatan memproduksi sesuatu yang bermanfaat, sehingga narapidana digali potensinya, diberi kesempatan untuk berkreasi, berproduksi dan berprestasi.

Struktur bangunan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung memiliki sarana fisik bangunan permanen, yaitu sarana untuk kantor yang berdiri pada tanah dengan luas 3.000 m<sup>2</sup>, kantor hunian sebanyak 4 blok seluas 6.000 m<sup>2</sup> dengan fasilitas ruang tidur, kamar mandi dan WC, dan ruang tugas. Kemudian bangunan Aula seluas 430 m<sup>2</sup>, bangunan dapur seluas 400m<sup>2</sup>, bangunan bengkel kerja seluas 1.100 m<sup>2</sup>, bangunan masjid seluas 100 m<sup>2</sup>, dan bangunan gereja seluas 80 m<sup>2</sup>. Bangunan permanen tersebut dikelilingi oleh tembok tinggi dan setiap sudut tembok mempunyai pos penjagaan. Sebelum memasuki pintu gerbang Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung terdapat pintu portir yang merupakan pusat dari semua pos-pos penjaga dari tempat narapidana atau tahanan tersebut<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Dokumentasi lembaga peamasyarakatan kelas 1 bandar lampung, di akses pada tanggal 10 november 2018, jam 15:05

<sup>64</sup>Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, diakses pada tanggal 10 november 2018, jam 15:38

## 2. Tujuan, Visi, dan Misi

Agar lebih jelas tentang arah ke depan suatu Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu lembaga pembinaan bagi narapidana, maka perlu adanya visi dan misi yang menjadi panduan dalam rangka mencapai tujuan. Adapun visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yaitu: memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan Pemasyarakatan (narapidana) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa membangun manusia mandiri

Sedangkan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yaitu :

- a. Menegakkan supremasi hukum
- b. Peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- d. Mewujudkan kehidupan dan penghidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sejuk, aman, damai dan sejahtera.
- e. Peningkatan perlindungan hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana
- f. Mewujudkan pelayanan prima<sup>65</sup>.

Kemudian mengenai tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yaitu sebagai berikut :

- a. Membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak

---

<sup>65</sup> *Dokumentasi* Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, di akses pada tanggal 10 november 2018, jam 16:11

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan rumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan<sup>66</sup>

### **3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung**

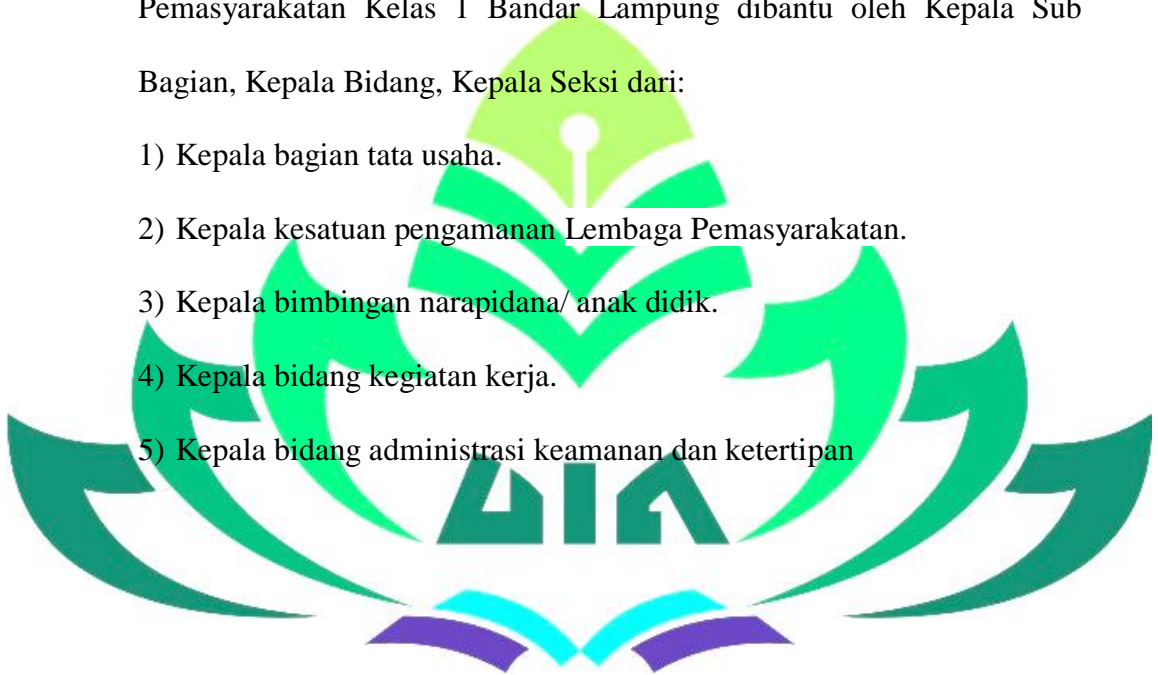
Berdasarkan keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia nomor: M.01RP.07.03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan pada pasal 2 bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan narapidana atau anak didik”. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.

---

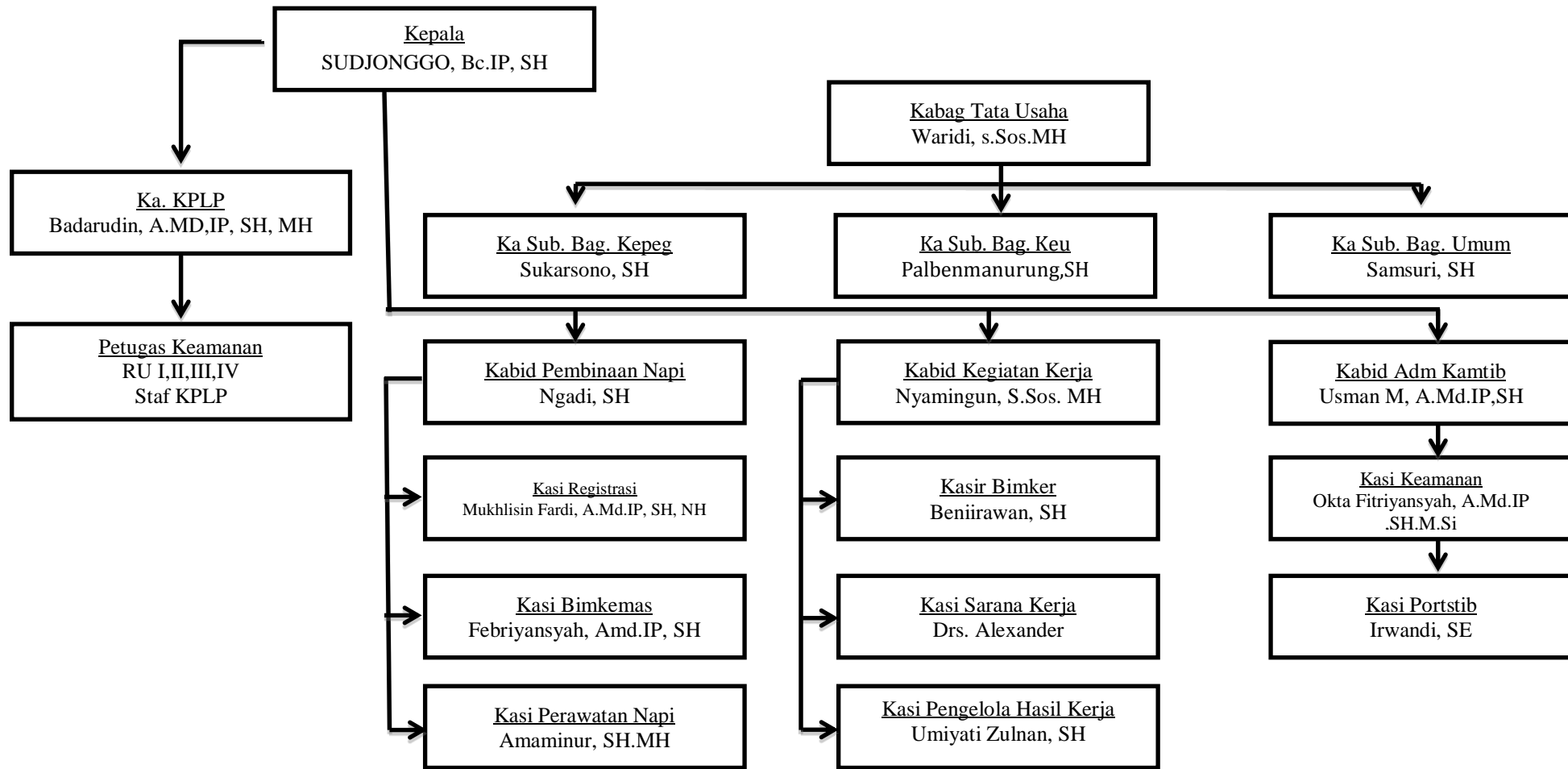
<sup>66</sup> *Dokumentasi* Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, di akses pada tanggal 10 november 2018, jam 16:17

- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana/ anak didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dari:
  - 1) Kepala bagian tata usaha.
  - 2) Kepala kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
  - 3) Kepala bimbingan narapidana/ anak didik.
  - 4) Kepala bidang kegiatan kerja.
  - 5) Kepala bidang administrasi keamanan dan ketertipan





# STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG



Gambar 3.1 Bagan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, 2018  
 Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, 2018

#### 4. Keadaan Petugas Dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

##### 1 Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan pemerintah terhadap narapidana maka pegawai atau petugas pemasyarakatan adalah faktor yang sangat penting karna apabila pembinaan dilakukan dengan kualitas atau kuantitas petugas yang tidak memadai maka tujuan dari pembinaan tersebut tidak akan tercapai. Pada saat penulis mengadakan penelitian dalam rangka pengumpulan data maka diperoleh data mengenai jumlah keseluruhan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yaitu berjumlah 130 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung**  
**Berdasarkan Pembagian Tugas**

| No                   | Bidang Kerja   | Jumlah     |
|----------------------|----------------|------------|
| 1                    | TATA USAHA     | 20         |
| 2                    | PEMBINAAN      | 23         |
| 3                    | ADM KAMTIB     | 13         |
| 4                    | KEGIATAN KERJA | 17         |
| 5                    | KPLP           | 49         |
| 6                    | P2U            | 8          |
| <b>TOTAL PEGAWAI</b> |                | <b>130</b> |

*Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2018.*

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar**  
**Lampung Menurut Jenjang Pendidikan Formal**

| No           | Tingkat Pendidikan | Jumlah     |
|--------------|--------------------|------------|
| 1            | SD                 | -          |
| 2            | SLTP               | -          |
| 3            | SLTA               | 80         |
| 4            | D3                 | 13         |
| 5            | S1                 | 21         |
| 6            | S2                 | 16         |
| 7            | S3                 | -          |
| <b>Total</b> |                    | <b>130</b> |

*Sumber : Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2018.*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ternyata tingkat pendidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung masih tergolong rendah dalam melakukan pembinaan bagi narapidana, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah bahwa sejumlah 80 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung memiliki latar belakang pendidikan sekolah tingkat atas (SLTA), 21 orang memiliki latar belakang sarjana (S-1), 13 orang memiliki latar belakang pendidikan Diploma dan tingkat Pasca sarjana adalah 16 orang.

Dari data tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa pendidikan rata-rata petugas Lembaga Pemasyarakatan masih jauh di bandingkan dengan kebutuhan dilapangan, karena saat sekarang ini tingkat kejahatan suda berkembang dengan modus yang canggih serta dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi maka untuk itu agar pembinaan dan kegiatan berjalan baik harus didukung oleh sumber daya pretugas pemasyarakatan yang langsung menangani pembinaan narapidana.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Narapidana Yang Dibina Dilembaga**  
**Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Per Desember**

| No       | Register               | Pidana umum | Pidana khusus          |           |             |          | jumlah       |
|----------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|----------|--------------|
|          |                        |             | Narkotika psikotropika | korupsi   | trafficking | lainya   |              |
| <b>A</b> | NARAPIDANA             |             |                        |           |             |          |              |
| <b>1</b> | BI                     | <b>592</b>  | <b>394</b>             | <b>47</b> | <b>4</b>    | <b>1</b> | <b>1.038</b> |
| <b>2</b> | BII a                  | <b>1</b>    |                        | <b>8</b>  |             |          | <b>9</b>     |
| <b>3</b> | BII b                  |             |                        |           |             |          |              |
| <b>4</b> | BIII                   | <b>20</b>   | <b>24</b>              | <b>11</b> |             |          | <b>55</b>    |
| <b>5</b> | SEUMUR HIDUP           | <b>21</b>   | <b>24</b>              |           |             |          | <b>45</b>    |
| <b>6</b> | PIDANA MATI            | <b>5</b>    | <b>4</b>               |           |             |          | <b>9</b>     |
|          | JUMLAH NARAPIDANA      | <b>639</b>  | <b>446</b>             | <b>66</b> | <b>4</b>    | <b>1</b> | <b>1.156</b> |
| <b>B</b> | TAHANAN                |             |                        |           |             |          |              |
| <b>1</b> | AI                     |             |                        |           |             |          |              |
| <b>2</b> | AII                    |             |                        |           |             |          |              |
| <b>3</b> | AIII                   |             |                        | <b>1</b>  |             | <b>1</b> | <b>2</b>     |
| <b>4</b> | AIV                    |             |                        |           |             |          |              |
| <b>5</b> | AV                     |             |                        |           |             |          |              |
|          | JUMLAH TAHANA          |             |                        | <b>1</b>  |             | <b>1</b> | <b>2</b>     |
|          | JUMLAH TANAN (A DAN B) | <b>639</b>  | <b>446</b>             | <b>67</b> | <b>4</b>    | <b>2</b> | <b>1.158</b> |

### 5. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung

Prototif Kontruksi dan desain bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung terdiri dalam blok-blok terdiri dari sub-sub blok yang yang memiki daya tampung rata-rata 62 orang, tiap-tiap blok dilengkapi dengan fasilitas, antara lain :

- a. Lahan untuk pertamanan
- b. Ruang tidur
- c. Kamar mandi dan WC
- d. Ruang petugas
- e. Sel pengasingan
- f. Aula

Dimana bentuk ini memerhatikan segi-segi kebutuhan manusia akan adanya suasana lingkungan yang nyaman dan sehat sebagai elemen perikemanusiaan yang menciptakan tatanan sosial yang ada di masyarakat.

**Tabel 3.3**  
**Luas Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung**

| No            | Tanah yang dihunakan               | Luas / m <sup>2</sup>       |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1             | LAPAS, Jl. Pramuka                 | 48.050 m <sup>2</sup>       |
| 2             | Perumahan Dinas, Jl. Sisingamaraja | 506 m <sup>2</sup>          |
| 3             | Perumahan Dinas, Jl. Pramuka       | 320 m <sup>2</sup>          |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>48.876 m<sup>2</sup></b> |

*Sumber : Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2018.*

**Tabel 3.4**  
**Luas Bangunan Yang Dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung**

| No.           | Bangunan      | Luas / m <sup>2</sup>       |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1             | Kantor        | 3.000 m <sup>2</sup>        |
| 2             | Kamar Hunian  | 6.000 m <sup>2</sup>        |
| 3             | Aula          | 430 m <sup>2</sup>          |
| 4             | Dapur         | 400 m <sup>2</sup>          |
| 5             | Bengkel Kerja | 1.100 m <sup>2</sup>        |
| 6             | Masjid        | 100 m <sup>2</sup>          |
| 7             | Gereja        | 80 m <sup>2</sup>           |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>11.110 m<sup>2</sup></b> |

*Sumber : Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2018.*

## 6. Ketatalaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung

Pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan tercermin dalam 10 prinsip Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.



Ketatalaksanaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung meliputi :

a. Keamanan dan tata tertib

Berkaitan dengan penampungan penghuni, penempatan yang multi purpose menurut golongan-golongan berdasarkan :

1) Penempatan di dalam blok yang maksimum (maksimum security).

Pada blok A2, A3, B1, dan B2 (dengan tahap Pembinaan 0 s/d 1/3 masa pidana)

2) Penempatan di dalam blok yang medium (medium security), pada blok C1, C2, D1, dan D3 (dengan tahap Pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana)

3) Penempatan di dalam blok yang minimum (minimum security), pada blok A1, dan D2 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d 1/2 masa pidana)<sup>67</sup>

b. Kelengkapan Penghuni

Pakaian yang dipakai dalam lingkungan tempat pelaksanaan pidana disesuaikan dengan seragam biru, ekonomis, mudah dicuci. Disamping itu diberikan alat-alat untuk tidur, dan fasilitas untuk mandi dan peralatan makan, seperti mug sayur, mug minum, dan piring.

c. Kesehatan Fisik

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan medis dilaksanakan dengan mengadakan pemeriksaan rutin, melalui : pemeriksaan tahap persediaan air, pemeriksaan terhadap makanan, usaha-usaha kesehatan dengan tiap penghuni mempunyai medical record.

---

<sup>67</sup>Dokumentasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Penulis Melihat Tanggal 27 November 2018.

d. Kesehatan rohani

Mengadakan ceramah-ceramah agama, melakukan ibadah menurut agama masing-masing dan diberikan penyuluhan perorangan.

e. Makanan

Makanan narapidana mendapatkan perhatian yang diutamakan melalui pengolahan, penyajian, dan penyantapan makan. Untuk meningkatkan mortalitas yang baik bagi narapidana. daftar susunan bahan makanan : beras, ubi jalar, ikan asin, tempe, tahu, oncom, telur, kacang hijau, sayur segar, gula kelapa, pisang, minyak goreng, cabe dan bawang.

f. Rekreasi

Jenis-jenis rekreasi dilaksanakan meliputi ; menurut agama masing-masing yang diberikan penyuluhan :

- 1) Kesenian melalui organ tunggal, marhabanan, jaranan, dan gamelan
- 2) Mendengarkan radio
- 3) Menonton televisi
- 4) Olah raga

## **B. Program Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung**

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi kami, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan, maka kami telah melakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

1. Terlaksananya program program Bebas Pendanaan Utang (BPU)  
Menggunakan kupon penukaran WBP, sebagai pengganti uang WBP,

dengan nominal uang sesuai dengan uang sebenarnya dalam rangka membatasi dan mengendalikan pemilikan peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung oleh warga binaan Pemasyarakatan serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan uang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

2. Perubahan ruang kunjungan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I sekarang ruang kunjungan menyatu antar pengunjung dan WBP yang dapat berinteraksi langsung hal ini sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan publik dan membangun citra positif dengan perbaikan fasilitas layanan.

3. Tersedianya ruang tunggu kunjungan semula ruang kunjungan berada di teras depan pintu masuk lapas, hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dalam menunggu antrian kunjungan.

4. Dilaksanakannya pemberian layanan informasi dan pengaduan, dengan maksud memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selaku pengunjung yang berujung pada tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

5. Terlaksananya pemberian layanan publik dengan berbasis IT melalui Sistem DataBase Pemasyarakatan (SDP) yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat.

6. Terlaksananya MOU (Memorandum Of Understanding) atau naskah kerjasama dengan pihak Dosen dan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Majelis-Majelis ilmu Keagamaan Islam dan Instansi-instansi yang terkait daerah Bandar Lampung.

7. Terlaksanya kerjasama di bidang keagamaan nasrani dengan pihak Gereja Katholik Pahoman, Preson Fellowship Indonesia, GBI Malayahati dalam rangka pembinaan keagamaan bagi yang beragama nasrani.
8. Terlaksanya MOU (Memorandum Of Understanding) atau naskah kerjasama dengan pihak Yayasan Pendidikan Insan Kamil Lampung dalam rangka membina kepribadian bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.
9. Terlaksananya kegiatan kepramukaan bagi warga binaan Pemasyarakatan dalam rangka kesadaran berbangsa dan bernegara serta dalam rangka melatih kedisiplinan bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.
10. Tersedianya ruang rekreasi dan ruang baca dalam wujud perpustakaan, yang bekerjasama dengan perpustakaan daerah Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan wawasan dan minat baca bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.
11. Terlaksananya kerjasama di bidang kesehatan dengan mitra jejaring yaitu : Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Puskesmas Karang Anyar, SSG (Saburai Support Group) Lampung dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan Pemasyarakatan dan rangka Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV / AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.
12. Terlaksananya kerjasama Lapas Kelas I Bandar Lampung dengan pihak BLK (Balai Latihan Kerja) Provinsi Lampung untuk pelatihan menjahit dan

sablon bagi warga binaan Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pembinaan kemandirian bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.<sup>68</sup>

Pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh Lembaga Pemasyarakatan bisa dibilang cukup tinggi hal ini dibuktikan oleh prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh narapidana yang ada di Lembaga Paermasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung selma menjadi warga binaan, hal ini dikatan oleh bapak Samsuri SH pada saat wawancara yaitu

“Pelayanan yang kami berikan sudah dilakukan seobtimal mungkin, karna kami mempunyai target dalam pencapaian Lembaga Pemasyarakatan disini, kami juga melebarkan ruang tunggu bagi pengunjung dan kami juga melakukan kerja sama dengan pihak yayasan dalam rangka kepribadian warga binaan, dan masi banyak lagi.<sup>69</sup>

### **C. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Dalam Membina Narapida Penyalahgunaan Narkotika**

Adapun bentuk-bentuk pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Terapi Untuk Ketergantungan Napza**

Pengunaan NAPZA umumnya dilakukan pada dunia medis atau bidang kesehatan. Penyalagunaan pemakaian NAPZA yang bukan untuk tujuan pengobatan dan tidak dalam pengawasan dokter akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan secara fisik maupun mental.

---

<sup>68</sup>Dokumentasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Penulis Melihat Tanggal 27 November 2018.

<sup>69</sup> Hasil wawancara Samsuri SH, Kasubag Umum Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Penulis Melihat Tanggal 27 November 2018



Di Indonesia penggunaan istilah NAPZA lebih populer dengan sebutan narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat-obatan.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang pecandu selama menjalani program pemulihan yaitu :

- a. Tahap Rehabilitasi Medis Pada tahap ini warga binaan mendapat pemeriksaan kesehatan baik kesehatan fisik maupun mental secara menyeluruh oleh tenaga dokter dan perawat. Pada proses ini dapat diketahui sejauh mana pengaruh zat-zat narkoba memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan mental warga binaan. Hal ini membantu dalam memberikan penanganan dini bagi pecandu yang memiliki penyakit menular seperti HIV, Hepatitis dan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, SH. M. Si, :

“Narkoba sangat berbahaya bagi pemakainya, ini menjadi tugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung untuk melakukan program-program yaitu berguna untuk membantu narapidana penyalahgunaan narkotika agar tidak ketergantungan narkoba, program-program yang dilakukan berupa program Rumatan Metadone dan Terapi Komplementer yaitu Supaya meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit menular”<sup>70</sup>

Adapun penjelasan dari program-program tersebut yaitu :

#### 1) Program Rumatan Metadone

Program Metadone ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung menjalankan kebijakan pemerintah untuk Harm Reduction di Lembaga Pemasyarakatan. Program metadone adalah suatu terapi membantu

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Mulyadi Bimpas dan Kegiatan Keagamaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Pada Tanggal 28 November 2018

para pemakai berat narkoba jenis Heroin, melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi penggunanya tanpa kekhawatiran terjadinya gejala putus obat. Manfaat program metadone:

- a) Dengan dosis yang tepat akan membuat adiksi berhenti menggunakan heroin.
- b) Membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup normal.
- c) Mendorong adiksi hidup lebih sehat.
- d) Menurunkan resiko penularan HIV / AIDS, Hepatitis B dan C karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril.
- e) Menurunkan tindak kriminal
- f) Membuat orang jauh lebih baik

Program methadone di Lembaga Pemasyarakatan 1 Bandar Lampung telah berjalan sejak tanggal 15 oktober 1993 total keseluruhan jumlah warga binaan yang pernah mengikuti program ini sebanyak 373 orang. Pelaksanaan pemberian program terapi ini setiap hari pada jam 09:00 sampai dengan jam 12.00 WIB.

## 2) Terapi Komplementer

Terapi komplementer adalah suatu terapi tambahan, pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada potensi diri seseorang dan alam. Dalam terapi ini seorang diajarkan beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu kedokteran maupun ilmu tradisional. Tetapi komplementer mulai dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

1 Bandar Lampung sejak tanggal 8 November 2008 dengan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Malahayati . Pada awalnya terapi ini diperuntukkan untuk membantu warga binaan yang sudah terinfeksi HIV AIDS, agar kesehatan mereka bisa terjaga dengan baik. Namun saat ini terapi komplementer dapat dimanfaatkan oleh warga binaan lain yang memiliki minat pada terapi ini. Adapun jenis-jenis terapi komplementer :

- a) Olah nafas
- b) Meditasi
- c) Akupunktur
- d) Prana

Menjaga kesehatan melalui menu sehat Manfaat terapi komplementer adalah :

- a) Untuk mencegah penularan
- b) Menjaga stamina dan kekebalan tubuh
- c) Mengatasi keluhan fisik yang ringan
- d) Mengurangi dan menghindari stress.

Jadwal terapi komplementer adalah seminggu dua kali setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 10.00-12.00 WIB.

#### b. Tahap Rehabilitasi Non Medis

Pada tahap ini warga binaan menjalankan salah satu program terapi rehabilitasi yang bertujuan untuk merubah perilaku adiksi yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Melalui terapi dukungan kelompok para pecandu mendapatkan bimbingan dan pembelajaran

tentang bagaimana bersikap tegas untuk meninggalkan dan menolak menggunakan narkoba kembali. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Ngadi, SH:

“Dalam membina narapidana, di sini Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung melakukan berbagai upaya yaitu dengan melakukan bimbingan dan pembelajaran untuk menolak menggunakan narkoba. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung juga menyediakan program-program non medis seperti Therapeutic Community (TC) dan Criminon, itu termasuk dalam pembinaan non medis kami”.<sup>71</sup>

Di bawah ini dijelaskan beberapa program non medis yang ditawarkan yaitu :

1) *Therapeutic Community* (TC)

TC adalah suatu program pemulihan yang membantu merubah perilaku adiksi seorang penyalahguna Narkoba menuju “Healthy Life Style” (Gaya hidup yang sehat tanpa narkoba). Bentuk kegiatannya berupa terapi kelompok yang biasa disebut sebagai “Family”

2) *Criminon*

*Criminon* diartikan sebagai No Crime, Terapi ini bertujuan untuk membentuk seseorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan. Filosofi dasar dari *criminon* menyatakan, bahwa pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan adalah karena kurangnya rasa percaya diri. Ketiadaan rasa percaya diri ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan serta tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat sehingga yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum.

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ngadi, Kabid Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Pada Tanggal 28 November 2018

## 2. Tahapan Rehabilitas After Care (Pendidikan)

Pada tahap ini warga binaan diberi kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupannya setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian pecandu bisa mengaktualisasikan diri ketengah masyarakat sebagai manusia yang produktif dan tidak lagi bergantung pada narkoba. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Samsuri, SH:

“Para narapida dibekali ilmu pengetahuan sesuai dengan minatnya masing-masing supaya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung mereka dapat menerapkan keahliannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini disediakan berbagai program pendidikan seperti pesantren terpadu dan kegiatan kerja seperti menjahit, kerajinan miniatur, kerajinan bambu, dan lain sebagainya”.<sup>72</sup>

Ada beberapa program yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan 1 Bandar Lampung yaitu :

### a. Pesantren Terpadu

Pesantren terpadu merupakan program pembinaan mental warga binaan guna mengembalikan nilai-nilai moral agama yang telah hilang. Ini berkaitan dengan perilaku mereka selama menjadi pecandu sangat jauh dari nilai-nilai spiritual. Melalui pendekatan agama diharapkan pecandu semakin memiliki dasar yang kuat untuk menata ulang kehidupan mereka kearah yang lebih baik. Hal ini juga dijelaskan oleh Narapida pada saat wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung :

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Samsuri Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Pada Tanggal 29 November 2018



“Banyak program yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung ini salah satunya yaitu pesantren terpadu, dalam program pesantren terpadu ini banyak yang telah saya dapat mulai dari pengetahuan agama, pentingnya agama, dan saya bisa lebih menghargai hidup saya selama disini, dan saya dapat mengambil hikmah dari pengalaman ini ”.<sup>73</sup>

b. Kegiatan Kerja

Untuk memperdayakan potensi dan menyalurkan bakat yang dimiliki warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung menyediakan beberapa kegiatan kerja yang diikuti diantaranya; pertukangan, pertanian, pencucian mobil, pembuatan kasur/spring bed, pembuatan kain tapis, laundry, kerajinan miniature, kerajinan bambu, menjahit, pembuatan paping blok. Diharapkan dengan adanya program ini pecandu bisa mengisi waktunya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dijelaskan pula oleh Narapidana penyalahgunaan narkoba pada saat wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung:

“Kegiatan kerja yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sangat banyak yaitu salah satunya program kerajinan miniature. Saya juga mengikuti program ini hingga saya mulai bisa membuat kerajinan sendiri selama disini, selain itu masih banyak lagi kegiatan kerja yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung ini.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Pada Tanggal 28 November 2018

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Pada Tanggal 28 November 2018

## **BAB IV**

### **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1995 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

#### **A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung**

Pelaksanaan pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali kedalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau pembimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, pembinaan adalah ; “pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, dan sistem pembinaan narapidana”.<sup>75</sup>

Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pengarahan dan kegiatan lainnya wujud pengarahan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para anggota Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan kebutuhan bagi para narapidana narkotika. Pembinaan dengan pengarahan

---

<sup>75</sup> Pembinaan Narapidana/Tahanan Keputusan Kementerian Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola,

dan kegiatan lainya yang programkan terhadap narapidana narkotikan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 bandar lampung yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu
2. Pembinaan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar
3. Pembinaan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari;
4. Pembinaan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan;
5. Pembinaan-pembinaan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 bandar lampung terdapat 2 faktor yang menjadi penghambat, yaitu :

1. Faktor Internal
  - a. Faktor Pendidikan
  - b. Faktor Sifat dan Kepribadian
2. Faktor Eksternal
  - a. Dana
  - b. Sarana dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan
  - c. Faktor administrasi
  - d. Proses pelaksanaan asimilasi
  - e. Sarana dan prasarana dalam pembinaan rehabilitas.

#### **B. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Dalam Membina Narapidana Penyalagunaan Narkotika Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995**

Pembinaan Perilaku terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung pada dasarnya pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah banyak mengadopsi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyrakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan

perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama dimana pembinaan ini dilakukan setiap hari bagi yang beragama Islam dan Kristen setiap hari, sedangkan yang beragama hindu dan budha cukup diberikan pembinaan budi pekerti, juga diikuti dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat (asimilasi), dari semua pembinaan yang dilakukan karena tidak mungkin ditangani oleh semua petugas, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung bekerjasama dengan pihak luar agar pembinaan tersebut mejadi berkualitas mengingat kemampuan petugas yang tidak mungkin untuk menangani semua pembinaan tersebut. Disamping itu juga dilihat dari jumlah petugas yang tidak sebanding dengan warga binaan. Namun kelemahan pembinaan ini adalah narapidana tidak bisa memilih pembinaan yang mereka inginkan.

Beberapa narapidana mengaku bahwa pembinaan hanya sebagai pengisi waktu senggang saja, karena pembinaan tidak sesuai dengan minat dan belajarnya. Agar pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana maka adanya dua pembinaan yaitu kepribadian dan kemandirian. Agar narapidana tidak memiliki rasa jenuh maka petugas pun memberikan pembinaan kemandirian, dimana pembinaan ini bisa dipergunakan saat narapidana sudah habis masa pidananya. Agar narapidana mau mengikuti



pembinaan kemandirian, maka petugas berusaha untuk mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang diperlukan narapidana. Dimana bakat seperti apa yang dimiliki oleh narapidana agar nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan merupakan tugas pembina untuk mengenal bakat dan minat dari narapidana masing-masing, paling tidak mengenal diri sendiri.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung ada petugas yang membina untuk mengarahkan narapidana untuk mengenal bakat dan minat narapidana. Team petugas ini biasa disebut dengan nama TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Atau biasa disebut orang tua wali yang bertugas membina narapidana selama satu bulan yaitu pada masa mapenaling (masa pengenalan lingkungan), setelah itu barulah narapidana diarahkan dan dibentuk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dengan demikian diharapkan bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, serta agar proses pembinaan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.



Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar

Lampung memiliki berbagai jenis ketrampilan diantaranya yaitu:

1. Pertanian
2. Pertukangan
3. Pencucian mobil
4. Pembuatan kasur/spring bed
5. Pembuatan kain tapis
6. Barber shop
7. Laundry
8. Pekerjaan taman dalam lapas
9. Kerajinan miniature
10. Kerajinan bambu
11. Menjahit
12. Pembuatan paving blok.



Dalam kedua pembinaan apabila dilihat tampaknya pembinaan di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung lebih fokus pada pembinaan kemandirian, namun tanpa mengesampingkan pembinaan kepribadian karena semua pembinaan penting bagi narapidana, tanpa terkecuali. Dilihat dari minat pembinaan ketrampilan yang dilihat mempunyai insensitas tinggi, jadi terkesan bahwa pembinaan ketrampilan yang diutamakan di Lembaga Pemasayrakatan.

Pada dasarnya di dalam pembinaan ketrampilan mempunyai tingkat kesulitan masing-masing, sesuai dengan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 yang terkandung dalam pasal 3:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pada awalnya pembinaan ini tidak mudah, maka tidak mungkin semua petugas menguasai ketrampilan yang diberikan. Untuk mendukung ketrampilan yang diberikan agar lebih berkualitas, maka Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak luar yang sesuai dengan bidangnya. Hasil kerja dari narapidana tersebut tidak sia-sia karena Lembaga Pemasyarakatan sudah mempunyai pasar untuk memasarkan hasilnya. Sekaligus memberi pembelajaran pada narapidana agar bisa memasarkan hasil kerjanya agar tak sia-sia, namun di samping dipasarkan di luar Lapas hasil ini pun bisa dinikmati oleh warga binaan sendiri. Adanya kerjasama dengan pihak luar diharapkan pembinaan ketrampilan ini dapat bermanfaat bagi para warga binaan dan bisa menjadikan pembinaan ini berkualitas, harapan dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri agar narapidana mempunyai bekal untuk siap bersaing dalam bidang pekerjaan diluar, setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Jika dilihat survei di lapangan pembinaan berjalan dengan lancar. Hal ini bisa dikatakan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para narapidana maupun petugas Lapas. Para petugas pun tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam pembinaan. Para narapidana mengakui bahwa pembinaan yang diberikan oleh petugas memang diperlukan untuk bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Mayoritas narapidana yang penulis wawancarai mengatakan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ingin

mengunjungi kedua orang tua dan keluarga untuk meminta maaf atas perbuatan yang pernah dilakukan, serta ingin mencari pekerjaan yang layak agar tidak terjerumus keperbuatan yang dulu pernah diperbuat.

Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta berperan bebas dan bertanggung jawab. dengan bekal pembinaan kepribadian, petugas berharap dengan memberikan bekal ketrampilan maka dapat menumbuhkan rasa kemandirian terhadap narapidana setelah keluar dari Lapas. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan keterampilan yang diberikan kepada narapidana.

Jika dilihat dari kemampuan narapidana sudah cukup menguasai semua pembinaan keterampilan yang diberikan oleh para petugas, namun tidak semua warga binaan bisa menguasai keterampilan yang diberikan petugas, kurangnya keseriusan para narapidana dalam menerima pembinaan keterampilan dijadikan faktor utama, padahal pembinaan keterampilan itu sendiri membentuk narapidana menjadi mandiri dan dapat dijadikan bekal untuk mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan kepribadian sendiri manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana sebagai sosok manusia yang diarahkan kefitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi, serta lingkungan. Maka pembinaan kepribadian dengan kemandirian memberikan bekal bagi narapidana untuk merubah perilaku dari perilaku yang tidak terpuji, menjadi perilaku yang baik, ramah, santun dan religius. Apabila setelah keluar narapidana biasa menerapkan bekal yang diberikan maka tidak sulit untuk mencari pekerjaan diluar sana.

### C. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Negara Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Buat kebajikan dan melarang berbuat kemunkaran. Namun, di tangan Allah jauhlah akibat semua urusan, Berdasarkan al-Qur'an pada surat An-Nissa ayat 59 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : 59)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa : 59) <sup>76</sup>

Islam datang untuk menegakkan kemaslahatan umat, dan dapat berwujud untuk perbaikan perilaku, ketentraman sosial, dan mencegah berbagai bahaya, maka Islam akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan kesalahan melanggar hukum.

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999), 112

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam melaksanakan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba tidak menyimpang dari tujuan agama yang disebut al-Khams atau lima prinsip dasar agama, dimana Islam mengajarkan mengenai manusia memiliki hak al-Karomah dan hak al-fadilah dan sunah Rasul adalah Rahmatan Lil Alamin, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama-utama seluruh manusia dan alam semesta. Akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung mengabaikan dua dari lima prinsip agama Islam, yakni :

Hfizun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Hfizul-aql yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan lain-lain.

Bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dadalam hukum Islam dikenakan sanksi cambuk sebanyak 80 kali, sedangkan di Indonesia bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dihukum penjara atau direhabilitas minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun di Lembaga Pemasyarakatan.



Lembaga Pemasyarakatan atau penjara merupakan tempat untuk memberikan hukuman atau sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sedangkan tujuan sanksi adalah membuat jerah, dan diharapkan setelah masuk di Lembaga Pemasyarakatan menjalankan hukuman dan pendidikan (pembinaan) diharapkan menjadi orang yang lebih baik lagi.

Pemerintah melalui UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Telah memberikan acuan untuk Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, harus mengedepankan pendidikan (pembinaan) supaya tidak mengulangi.

Sesuai Kaidah fihiyyah yang khusus di bidang siyasah juga menyatakan bahwa “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun golongannya. Pemimpin disini mempunyai cakupan yang luas diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung juga merupakan pemimpin yang menangani tentang pemasyarakatan dalam membina narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan sudah melaksanakan tugas memberikan sanksi yang berbentuk penjara dan pendidikan (pembinaan) ini telah sesuai dengan hukum Islam meskipun tidak dalam berbentuk cambukan tetapi tujuannya sama memberikan efek jerah tetapi yang paling utama adalah untuk memberikan pendidikan (pembinaan). Lembaga Pemasyarakatan sudah melaksanakan amanah yang sesuai hukum Islam sebagai pelaksana



kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pendidikan (pembinaan),  
bisa dikatakan telah sesuai dengan konsep Fiqh Siyasa.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan pola pembinaan yang dilakukan dari sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan berguna.
2. Pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung lebih difokuskan pada pembinaan kemandirian karena pembinaan kemandirian yang diberikan telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 yaitu sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3. Lembaga Pemasyarakatan suda melaksanakan amanah yang sesuai hukum Islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam meberikan sanksi dan pendidikan (pembinaan), bisa dikatakan telah sesuai dengan konsep Fiqh Siyasah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya narapidana dalam menerima pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung harus sungguh-sungguh, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup ditengah-tengah masyarakat dan lepas dari kecanduan narkoba.
2. Mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapida dalam proses pembinaan bukan saja insidensil melainkan harus bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap secara optimal.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung hendaknya memisahkan narapidana narkoba berdasarkan sanksinya, karena pengguna narkoba dan pengedar narkoba itu beda baik baik sanksi maupun pendidikannya (pembinaan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.
- Achmad S Soema Dipradja dan Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta 2004.
- AL, ADALAH VOL 11, No 1, 2013, Acep Syaifullah: *Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, diakses 14 Mei 2019
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniya*, Cet. II; Kairo: Musthafah al-Babi al-Halabi, 1966.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara Dengan System Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Biro Pusat Statistik, *Sumber Data Lembaga Kemasyarakatan*, Jakarta, 2004.
- C.I. Harsono, 2009, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Dipenogoro, 2001.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia. Edisi kedua cet. Ke-IX*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Surabaya: CV Jaya Sakti, 1997
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Heroepoetri, Arimbi, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2003.
- Ibn Manzhar, *Lisan al-'Arab* Jilid 6, bierut : Dar al-Shadir, 1986

Istiana, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik di Lembaga Permasyarakatan Anak Kuto Arjo*, 2000.

Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Lembaga Permasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011 h. 5 Lihat Juga R. Achmad S. Soemandi Praja dan Romli Atmasasmita, *System Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1992

Jur Andi Hamzah, *Termonologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kulintatif Bidang Filsafat*, Paradigm, Yogyakarta, 2005.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1993.

Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosda Karya, Bandung. 2001.

M. B. Ali. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2002.

Matthew B. Miles dan A. Wichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Ui-Press, Jakarta, 1992.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan.

Salimin Budi Santoso, *Kebijakna Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan System Pemasyarakatan*, Dirjen BTW, Jakarta, 2003.

Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soedjono Dirjosworo, *Sejarah dan Azas Teknologi/ Permasyarakatan*, Amico, Bandung, 1992.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Renika Cipta, Jakarta, 1998.

Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*, Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t, vol. 2

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Andioffset, Yogyakarta, 2004.

Suwandi, *Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam*, El-Qisth, No. 2, Vol. 1, Maret, 2005.

Syamsul Hidayat, *Pidana Mati Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, 2010.

Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

W.J.S. Poewodarminta, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen P dan K Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2 Jakarta: Gema Press, 1995.

Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, Cet ke-1.









Kegiatan wawancara dengan bapak Ngadi, SH (Kabid Pembinaan Napi)



Kegiatan wawancara dengan bapak Samsuri, SH (Ka Sub. Bag. Umum)



Kegiatan wawancara dengan ibu Sri Mulyani, SH. M.Si ( Bendahara Kabag Umum)



Kegiatan wawancara dengan bapak Erik, SH



Kegiatan wawancara dengan ibu Nur Laila, SH (Sekertaris Kabag Umum)



Dokumentasi foto dengan bagian Kasubag Umum



Kegiatan wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkoba

